

Per 72/05

Ang  
P

## **SKRIPSI**

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH PADA BANK SYARIAH**



**ISTER ANGELIA**

**NIM. 030115311**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
BERMASALAH PADA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

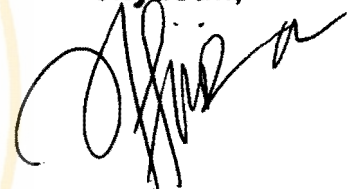
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



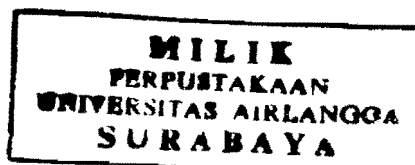
**Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**  
**NIP. 131999627**

**Penyusun,**



**Ister Angelia**  
**NIM. 030115311**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya dalam pembiayaan musyarakah dengan prinsip bagi hasil adalah hubungan sebagai mitra usaha. Karena bank syariah dengan nasabahnya, masing-masing menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelola proyek (usaha) yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan prosentase penyetoran modal masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan musyarakah menerapkan prinsip *profit and loss sharing*.
2. Pembiayaan musyarakah yang tergolong bermasalah adalah pembiayaan musyarakah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah. Pembiayaan musyarakah bermasalah dapat disebabkan oleh faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor *intern* yaitu faktor yang menyangkut bank

syariah maupun nasabah itu sendiri, sedangkan faktor *ekstern* yaitu mengenai faktor perekonomian secara makro. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah yakni dengan cara melalui restrukturisasi dan/atau lembaga arbitrase atau Pengadilan Umum.

#### IV.2. Saran

1. Pembiayaan musyarakah belum begitu banyak diterapkan oleh Bank Syariah di seluruh dunia, biasanya hanya pada bank-bank syariah yang sudah mempunyai pengalaman. Karena dalam pembiayaan ini, masing-masing para pihak menyetorkan modalnya untuk mengelola perusahaan dan para pihak dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut. Bank sebagai pihak dalam perjanjian musyarakah ini, tentunya mempunyai aktivitas yang tidak sedikit serta memerlukan karyawan yang selalu berada di bank untuk memberikan pelayanan. Sehingga ketentuan untuk ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut harus merupakan suatu hak dari para pihak dan para pihak mempunyai hak untuk mengugurkan hak itu (menguasakan). Selain itu, untuk mempermudah pembentukan perjanjian maka perlu dibuat penyeragaman perjanjian pembiayaan musyarakah di bank syariah.
2. Islam lebih menyenangi penyelesaian dengan cara damai dan adil. Oleh karena itu, sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah dapat diselesaikan dengan cara damai dan akan

diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Sehingga perlunya pengaturan klausul tentang arbitrase pada setiap perjanjian pembiayaan musyarakah di Bank Syariah. BAMUI merupakan lembaga arbitrase yang berdasarkan syariah sesuai dengan prinsip Islam.

